

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Reviu

Penulis membagi penelitian menjadi beberapa pokok pembahasan. Literatur reviu dapat membantu penulis dalam menjelaskan variable bebas, variable terikat serta keterkaitan keduanya. Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang kerjasama *sister city* Kota Bandung dan Kota Suwon dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan teknologi. Diantara penelitian yang terdahulu, penulis mengambil referensi dari penelitian yang ditulis oleh Luqman Fadhil Gultom dalam skripsinya dengan judul *Dinamika Kerjasama Sister City Kota Bandung–Kota Suwon pada Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2018* (Gultom, 2020).

Dalam penelitiannya, Luqman memaparkan paradiplomasi sebagai bentuk kapasitas bagi aktor subnegara atau pemerintah daerah melakukan hubungan luar negeri dengan pemerintah daerah di negara lain dijalin untuk mencapai kepentingan yang spesifik dan menstimulasi perkembangan daerahnya. Bentuk paradiplomasi sendiri dapat dipraktekan dalam kerangka kerjasama antara pemerintah daerah dalam dengan pemerintah daerah di luar negeri berbentuk *sister city*. Hal ini diadopsi oleh Kota Bandung yang berada di Indonesia, dan Kota Suwon yang berada di Korea Selatan.

Kerjasama *sister city* Bandung dan Suwon didasari dengan adanya ketertarikan terhadap potensi yang dimiliki antara kedua kota. Bandung melihat Suwon sebagai mitra dalam mengembangkan sistem pendidikan Kota Bandung serta *sister city* ini sebagai wadah untuk menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan yang ada di Kota

Suwon. Disisi lain, Suwon melihat peluang kerjasama di bidang pendidikan dengan Bandung melalui pameran pendidikan tinggi yang ada di Kota Suwon dan bekerjasama dalam hal pendidikan di industri kreatif sehingga pemuda di Kota Bandung dapat mempelajari industri kreatif yang ada di Kota Suwon. Dibidang kebudayaan kedua kota melihat potensi kebudayaan masing-masing yang dapat diperkenalkan dan dipromosikan di level internasional melalui kesenian dan Bahasa.

Program-program yang telah dijalankan melalui *sister city* Bandung dan Suwon di bidang pendidikan dan kebudayaan, mencakup pertukaran pemuda *Suwon Youth Foundation* yang berperan untuk mempromosikan kebudayaan serta memberikan kelas Bahasa Korea di beberapa sekolah menengah dan perguruan tinggi di Bandung. Selain itu, bantuan pembangunan fasilitas penunjang pendidikan berupa alat tulis dari Pemerintah Kota Suwon di Kelurahan Sukamulya, Bandung. Selain beberapa alat tulis, bantuan pendidikan juga diberikan berupa pembangunan fasilitas PAUD di Sukamulya, Bandung. Lalu, dalam kerangka *sister city* ini, terjalin kerjasama institusi pendidikan tinggi di Bandung dengan Universitas di Suwon dalam hal penelitian, studi banding dosen maupun mahasiswa ke sistem pendidikan tinggi Suwon.

Selanjutnya penulis menggunakan referensi dari Rona Abriana Fitri dalam skripsinya dengan judul *Analisis Kerjasama Sister City Bandung dengan Suwon Periode 2011-2014* (Fitri, 2016). Dengan adanya pembentukan kerjasama *sister city* atau kota kembar yang telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.03 Tahun 2008. Bahwa setiap kota/provinsi dapat mengadakan kerjasamanya dengan kota lain. Kerjasama *sister city* dipandang sangat membantu

bagi fungsi-fungsi pemerintah dalam membina Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam pembangunan.

Bentuk-bentuk kerjasama yang berjalan pada tahun 2011-2014 sudah berjalan sebanyak 5 kegiatan yaitu:

- a. Pariwisata
- b. Teknologi informasi
- c. Pendidikan
- d. Kebudayaan, dan
- e. Kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya tidak ada istilah suatu bidang yang dikerjasamakan dalam *sister city* tersebut mengalami kegagalan. Selama kedua kota tersebut (Bandung & Suwon) masih melangsungkan program *sister city* dan tidak memutuskan hubungan kerjasamanya, maka akan ada kemungkinan semua bidang yang tercantum dalam MoU akan dilaksanakan. Selama periode 2011 hingga 2014 kerjasama *sister city* yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Kota Suwon menghasilkan beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan *sister city* Bandung-Suwon selama periode 2011-2014 antara lain: 2 kegiatan di bidang pariwisata, 1 kegiatan di bidang teknologi dan administrasi, 5 kegiatan di bidang pendidikan, 2 kegiatan di bidang kebudayaan, dan 2 kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.

Selanjutnya penulis menggunakan penelitian dari Dr. Enok Maryani yang berjudul *Pengembangan Pariwisata Bandung Persepsi Wisatawan* (Maryani D. E., 2012). Pariwisata akan menjadi sektor andalan penghasil devisa pada masa yang akan datang, Kota Bandung merupakan kota yang relatif dekat dengan Jakarta sebagai pintu

gerbangnya Indonesia, menjadi pusat pelayanan (*service center*) dan kutub pertumbuhan (*growth pole*) bagi Jawa Barat. Di kawasan ini terakumulasi fasilitas pelayanan, kegiatan ekonomi dan menjadi simpulnya transportasi Jawa Barat. Di Kota Bandung terdapat sekitar 22 objek dilihat dari jumlah wisatawan yang datang, dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat, tahun 2000 mencapai 2.117.255 orang. Mengingat potensi lokasi, alam dan sosial budaya, Bandung telah dijadikan sebagai “Tirai Seni Indonesia ke Dunia” oleh Direktorat Jenderal Pariwisata Indonesia, dengan Visi “*Genah, Merenah tur Tumaninah*” (Enak, Tepat dan Nyaman).

Daerah tujuan wisata atau *destination zones* adalah daerah dengan satuan geografis tertentu yang dapat menampung sejumlah wisatawan. Daerah itu memiliki cukup banyak dan beragam atraksi wisatanya, memiliki berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Kriteria daerah tujuan wisata menurut Direktorat Jendral Pariwisata Jawa Barat adalah:

- a) Tersedianya objek wisata yang telah siap dikembangkan
- b) Tersedianya prasarana transportasi yang mendukung aksesibilitas
- c) Tersedianya sarana pariwisata
- d) Kesiapan masyarakat untuk menerima kunjungan wisatawan
- e) Memiliki Dinas Pariwisata Daerah
- f) Memiliki perangkat peraturan untuk mengatur usaha wisata dan objek wisata.

Pariwisata membutuhkan keterpaduan berbagai sumberdaya, sumberdaya tersebut dapat berupa iklim, variasi *landscape*, variasi penutup lahan, keindahan, kenyamanan, kebersihan, keselamatan, keunikan, variasi aktivitas wisata, atraksi budaya, cenderamata

yang dapat dibeli, kemudahan untuk menjangkau dan fasilitas objek wisata yang berupa toilet, rambu-rambu berwisata, informasi tentang objek wisata, *openscape* untuk Tempat Istirahat Penumpang (TIP) dan pusat penerangan bagi wisatawan (TIC).

Selanjutnya penulis menggunakan penelitian dari M. Priyadi Ekananda dengan judul *Dampak Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Suwon (Republik Korea) Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Bandung* (Ekananda, 2014). Kota Bandung adalah kota yang multietnik, walaupun demikian kebudayaan Sunda masih memegang peranan dalam hidup keseharian, baik masyarakat Sunda maupun etnik pendatang menggunakan Bahasa Sunda atau Indonesia sbagai bahasa komunikasi sehari-hari. Kebudayaan Sunda merupakan manifestasi gagasan dan pikiran serta kegiatan baik yang abstrak maupun berbentuk benda yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tinggal di daerah Priangan dan menamakan dirinya orang Sunda. Kebudayaan sunda termasuk salah satu kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang berusia tua. Bahkan, dibandingkan dengan kebudayaan Jawa sekalipun, kebudayaan Sunda sebenarnya termasuk kebudayaan yang berusia relatif lebih tua, setidaknya dalam hal pengenalan terhadap budaya tulis. Lalu Kota Suwon, Suwon yang terkenal di berbagai sisi sejarah Korea berkembang dari perkampungan kecil dalam masa yang sulit, menjadi kota industri dan kota berbudaya. Suwon terkenal sebagai kota yang memiliki sisa dari Tembok Benteng Hwaseong yang bersejarah di Korea Selatan. Dan Tembok Benteng Hwaseong ini menjadi salah satu tujuan kedatangan turis paling populer di Provinsi Gyeonggi. Suwon juga merupakan kota pusat pendidikan di Korea Selatan, rumah dari 11 universitas. Sebagai pusat industri Suwon menjadi rumah bagi perusahaan besar Pabrik Elektronik Samsung.

Dulu Suwon merupakan pusat pasar bagi produk pertanian lokal, sekarang Suwon telah menjadi pusat penelitian teknologi dan pengembangan dan pembuatan elektronik di Korea Selatan. *Seoul National University College of Agriculture dan Life Sciences* dan Kantor Pemerintahan Pertanian memiliki beberapa lembaga penelitian di sana. Suwon memiliki banyak peninggalan sejarah, sebagian besar dari mereka berasal dari abad ke-18. Yang paling penting adalah Hwasŏng (Hwaseong), benteng yang dibangun oleh Raja Chŏngjo (Jeongjo) pada tahun 1796 yang sebelumnya menutupi seluruh Suwon sebelum terjadi perluasan wilayah di luar tembok. Benteng ini ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1997.

Dalam sejarah, Suwon yang dibangun pada masa Dinasti Joseon, dimana kesenian lukisan berkembang pesat. Seni lukis awal Joseon dipengaruhi oleh cara melukis gaya Cina, namun pada masa-masa berikutnya para seniman Joseon mulai mengembangkan gaya mereka sendiri. Para pelukis dikantor pelukis pemerintah (*dohwaseo*), melukis dalam berbagai jenis tema, mulai dari bunga, tanaman, burung, potret diri, kehidupan sehari-hari dan hewan. Beberapa pelukis Joseon yang terbesar adalah Kim Hong-do dan Jeong Seon.

Lalu penulis menggunakan penelitian dari Gunawan Kusmantoro dengan judul Hubungan dan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (Kusmantoro, 2016). Hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri harus diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri. Sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara termasuk pemerintah daerah.

Pemerintah daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan diplomatik. Dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, pemerintah daerah bertindak sebagai elemen atau atas nama negara, bukan atas nama pemerintah daerah. Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri akan memberikan saran dan pertimbangan politis dan yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan badan/lembaga di luar negeri.

Untuk kerjasama provinsi dan kabupaten/kota kembar, selain memenuhi persyaratan, juga harus memperhatikan ketentuan yakni;

- a) Kesetaraan status administrasi
- b) Kesamaan karakteristik
- c) Kesamaan permasalahan
- d) Upaya saling melengkapi, dan
- e) Peningkatan hubungan antar masyarakat.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Diplomasi Pariwisata

Diplomasi berasal dari kata Yunani “*diploun*” yang berarti “melipat”. Menurut *The Chamber’s Twentieth Century Dictionary*. Diplomasi adalah “*the art of negotiation, especially o treaties between states; political skill*” (seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara negara; keahlian politik). Ivo D. Duchacek berpendapat, “diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. Tetapi diplomasi kadang-kadang

dihubungkan dengan perang. Oleh karena itulah Clausewitz, seorang filosof Jerman, dalam pernyataannya yang terkenal mengatakan bahwa perang merupakan kelanjutan diplomasi melalui sarana lain. (Setiawan, 2021)

Fungsi diplomat menurut Norman dan Howard C. Parkins, 1957 sebagai duta dari negaranya maka diplomasi memiliki fungsi;

- Representasi
Mewakili negara asalnya dalam melakukan perundingan dan sebaianya dengan membawa nama negara asal.
- Negosiasi
Melakukan negosiasi dengan negara lain berkaitan dengan permasalahan negara asal.
- *Reporting*
- Perlindungan kepentingan bangsa dan warganya di tanah asing.

Menurut S. L. Roy, 1991 tujuan dari diplomasi yaitu:

- Tujuan Politik
Mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh serta melindungi kedaulatan wilayah NKRI dari sabang sampai merauke.
- Tujuan Ekonomi Nasional
- Tujuan Kultur
Melestarikan serta memperkenalkan kebudayaan nasional pada dunia internasional.
- Idiologi

Mempertahankan leyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah bangsa dalam konteks Indonesia ialah Pancasila.

Di Indonesia, praktek diplomasi yang dijalankan agak berbeda dengan praktek diplomasi yang banyak dilakukan oleh negara-negara lain khususnya negara maju. Indonesia dalam melaksanakan diplomasi publiknya tidak hanya mengarah kepada publik internasional tetapi juga mengarah kepada publik domestik. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor bahwa politik internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal sebuah negara dan sisi lain dinamika politik dalam negeri juga banyak dipengaruhi oleh berbagai isu-isu internasional. Dalam menjalankan diplomasinya, Pemerintah Indonesia sangat menekankan pada penggunaan *soft power* dalam aktifitas diplomasi. Penggunaan *soft power* dinilai lebih efektif dalam penerapan diplomasi publik dibandingkan menggunakan *hard power*.

Dalam dinamikanya, penggunaan sektor pariwisata menjadi tren di kalangan hubungan internasional dalam menjalankan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Secara prinsip, tujuan dari sektor pariwisata tersebut berupa sebuah industri perjalanan dimana yang difokuskan adalah kegiatan berlibur. Dalam pengimplementasiannya, pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam menarik perhatian masyarakat dunia dan mendorong mereka untuk mengenal dan mempelajari kebudayaan suatu negara. Faktor tersebut yang mendorong pemerintah suatu negara untuk mengembangkan sektor pariwisata dan menjadikannya bagian dalam aktifitas diplomasi dalam rangka memperkenalkan negaranya kepada dunia internasional. Di Indonesia, praktek diplomasi yang masih menjadi salah satu metode dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri pada dasarnya dipengaruhi oleh realitas

politik domestik Indonesia itu sendiri dan juga tidak dapat terlepas dari tatanan politik global. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi diplomasi publik Indonesia adalah diplomasi dengan menggunakan instrumen pariwisata. Tujuan dari diplomasi melalui sektor pariwisata tersebut adalah untuk menguatkan *national branding* Indonesia merupakan negara yang kaya dari sisi wisata alam, seni dan budaya. Kekayaan alam yang dimiliki menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan global. Pemanfaatan sektor pariwisata dianggap efektif dalam pelaksanaan diplomasi karena pelaksanaannya yang tanpa paksaan, dan keyakinan bahwa pariwisata lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mengandung nilai-nilai yang universal seperti nilai budaya, tradisi, agama, estetika, bangunan-bangunan peninggalan sejarah maupun bangunan moderen yang unik sehingga mampu menarik masyarakat dunia.

Dalam mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah yang dalam hal ini kementerian pariwisata memiliki sasaran strategis yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan kepariwisataan. Sasaran tersebut berupa:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata.
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata.
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.
5. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.
6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

7. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata.
8. Meningkatnya jumlah perjalanan dan pengeluaran wisatawan lokal.

(Ayunda, 2020)

2.2.2 Hubungan Luar Negeri ke Pemerintah Daerah

Selanjutnya, hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri harus diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri. Sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan diplomatik. Dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, pemerintah daerah bertindak sebagai elemen atau atas nama negara, bukan atas nama pemerintah daerah. Undang-undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tidak memerinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Luar Negeri pada 2012 menerbitkan buku panduan (*handbook*) sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri. Bidang-bidang hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri antara lain; (a) kerjasama ekonomi yakni perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, kependudukan, pariwisata,

lingkungan hidup dan perhubungan; (b) kerjasama sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olahraga, kesenian; dan (c) bentuk kerjasama lain.

Kementrian Luar Negeri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri akan memberikan saran dan pertimbangan politis dan yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan badan/ lembaga luar negeri. Sedangkan departemen teknis dan pertimbangan mengenai materi atau substansi program kerjasama. Mekanisme itu menjadi acuan umum bagi setiap kerjasama ekonomi dan kerjasama sosial budaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak asing termasuk kerjasama perbatasan oleh pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah negara asing. Namun hal itu tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah komisi bersama (*joint commission*), forum konsultasi bilateral (*bilateral consulation*), komite bersama mengenai perbatasan (*joint border commission*), dan promosi terpadu serta kerjasama ekonomi subregional.

Koordinasi dan konsultasi juga diperlukan dalam pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri yang memerlukan penanganan khusus terutama pada bidang hubungan dan kerjasama yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, yakni:

- a) Kerjasama kota/ provinsi kembar.

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri (*sister province/ sister city*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati

kedaulatan NKRI, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

b) Kerjasama teknik luar negeri.

Kerjasama teknik luar negeri adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan negara dan badan/ lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, ahli teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Sebelum kerjasama teknik dilakukan, Kementerian Luar Negeri akan memberikan pertimbangan politis yuridis agar aman secara politis, keamanan, yuridis dan teknik. Kerjasama teknik dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian internasional.

c) Kerjasama ekonomi subregional (KESR).

Kerjasama ekonomi subregional (KESR) merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan pemerintah daerah di sekitar wilayah perbatasan Indonesia, dilakukan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan dalam pengembangan wilayah (*open regionalism*), dan bukan untuk membentuk blok ekonomi kawasan yang tertutup.

d) Mekanisme melakukan hubungan dan kerjasama dengan LSM asing.

Pemerintah daerah yang berminat melakukan kerjasama dengan LSM asing harus mengajukan permohonan tertulis beserta kelengkapan

administrasinya melalui Kementerian Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri guna mendapat persetujuan.

- e) Pendirian lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, dan badan promosi.

Badan-badan lembaga Indonesia lainnya di luar negeri didirikan melalui koordinasi dan dukungan pemerintah, namun sepenuhnya harus dikelola oleh pihak swasta/ individu yang tunduk pada hukum setempat. Kegiatan ini bisa meliputi kerjasama perdagangan, pariwisata, investasi, sosial budaya dan pendidikan antarprovinsi atau kota diluar negeri.

- f) Mekanisme pendirian perhimpunan persahabatan.

Perhimpunan persahabatan didirikan di ibukota negara Indonesia. Permohonannya diajukan kepada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dengan melampirkan AD/ART perhimpunan tersebut dan susunan pengurusnya.

- g) Kegiatan jurnalistik bagi warga negara asing.

Kunjungan jurnalis asing ke daerah, selain telah memenuhi persyaratan keimigrasian, harus mendapatkan surat jalan ke daerah dan Mabes Kepolisian RI atas dasar rekomendasi Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri.

- h) Pengamanan misi diplomatik/ konsuler.

Pengamanan terhadap aset, personil, dan dokumen perwakilan diplomatik/ konsuler baik di tingkat pusat dan daerah dilakukan dengan

pengamanan regular, pengamanan permanen/ semi permanen, dan pengamanan dalam keadaan darurat.

- i) Perlindungan kepentingan WNI dan badan hukum Indonesia.
- j) Penanganan WNA yang dituduh melakukan tindak pidana di Indonesia.
- k) Penanganan pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap dari luar negeri.
- l) Pelayanan fasilitas diplomatik.
- m) Pelayanan keprotokolan kunjungan pejabat asing ke daerah dan sebaliknya.
- n) Pelayanan kekonsuleran.
- o) Pembuatan perjanjian internasional.
- p) Ijin penelitian bagi warga negara asing; dan
- q) Pengiriman misi ekonomi, sosial dan budaya dari dan ke luar negeri.

(Kusmantoro, 2016).

Kerjasama Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri (*Government to Government*) mencakup segala bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemda dengan Pemda di luar negeri. Kerjasama ini sebagian besar ditunjukkan sebagai jalan pembuka bagi dilakukannya kerjasama antar masyarakat di kedua daerah seperti dalam bidang-bidang perniagaan dan kegiatan bisnis lainnya, apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI, perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri RI dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-

Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal daerah memerlukan informasi, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, dapat menghubungi Departemen Luar Negeri, c.q. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) (Thontowi, 2009).

2.2.3 Sister City Kota Bandung dan Kota Suwon

Sister City merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Didalam buku panduan *Sister City Kota Bandung*, Pemerintah Kota Bandung menjelaskan bahwa *sister city* adalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan kota di suatu negara dengan kota di negara lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan yang erat dan saling menguntungkan. *Sister city* dapat meningkatkan volume kerjasama dengan perkembangan di berbagai bidang kerjasama yang dianggap perlu bagi kesejahteraan masyarakat di suatu kota. Kerjasama *sister city* di Indonesia sudah muncul pada tahun 1960-an. Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan kerjasama tersebut, namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh kesamaan. Pada tahun 1980-an kerjasama internasional dalam bentuk *sister city* semakin marak, pada saat ini kurang lebih 100 kerjasama internasional yang berbentuk *sisterhood* telah tercatat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dari catatan yang ada, mungkin tidak sampai 15% dari kerjasama tersebut yang

berjalan dengan baik, dan tidak sampai 20% berjalan dengan seadanya dan sisanya lebih dari 65% hamper tidak melakukan kegiatan apapun.

Kota Bandung mengadakan hubungan kerjasama *sister city* sejak tahun 1960 dengan Kota Braunschweig, Jerman, sehingga menjadi kota pertama sekaligus kota terlama dalam penyelenggaraan kerjasama *sister city* di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jalam dan teknologi, Kota Bandung memperluas jalinan hubungan kerjasama dengan kota-kota lain diluar negeri seperti Kota Forth Woth – Texas, Amerika Serikat; Kota Suwon, Republik Korea; Yingkou dan Liuzhou, Republik Rakyat China. Kota Bandung telah memiliki kerjasama *sister city* sebagai jembatan bagi potensi masyarakat Kota Bandung untuk berkembang dalam masyarakat dunia dan menjadikan penting bagi pengembangan kegiatan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat dunia.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta rumusan masalah, maka penulis membuat hipotesis penelitian berupa;

“Dengan adanya kerjasama sister city Kota Suwon dan Kota Bandung, maka kunjungan wisatawan Korea ke Bandung meningkat.”

2.4 Operasionalisasi Variabel

Variable dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Variable (Analisis)
-------------------------------------	---------------------	---------------------

<p>Variabel Bebas:</p> <p><i>Jika Pemerintah Kota Bandung melakukan promosi sektor pariwisata dan program-program kerjasama sister city dengan Kota Suwon</i></p>	<p>1. Kerjasama <i>sister city</i> di sektor pariwisata.</p> <p>2. Pertukaran pemuda Suwon Youth Foundation.</p>	<p>1. Hubungan “Sister City” yang terjalin antara Kota Bandung dan Kota Suwon, Korea Selatan telah membawa manfaat bagi kedua kota. Kerjasama yang telah terjalin selama hampir 21 tahun. Sumber: https://humas.bandung.go.id/berita/suwon-tawarkan-pendidikan-industri-kreatif</p> <p>2. Dimulai sejak tahun 2011 Program Pertukaran Pemuda dirintis kembali dari inisiatif Suwon Youth Foundation dengan mengirimkan Delegasi. Sumber: https://bandungnewsphoto.com/2013-01-26/delegasi-suwon-korea-kunjungi-kota-bandung</p>
<p>Variabel Terikat:</p> <p><i>maka jumlah kunjungan wisatawan Korea ke Bandung akan meningkat.</i></p>	<p>1. Inovasi di bidang pariwisata</p>	<p>1. Rencana Silicon Valley Indonesia, Diharapkan Mampu Mendorong Inovasi Digital Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sumber:</p>

	<p>2. Pembangunan sumber daya alam.</p>	<p>https://www.kemenparekra.f.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Rencana-Silicon-Valley-Indonesia%2C-Diharapkan-Mampu-Mendorong-Inovasi-Digital-Sektor-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif.</p> <p>2. Pembangunan sumber daya alam Indonesia perlu ditingkatkan agar jumlah kunjungan pariwisata mancanegara dapat meningkat. Sumber: https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/15/150748669/mengelola-sumber-daya-alam-berwawasan-lingkungan.</p>
--	---	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian

